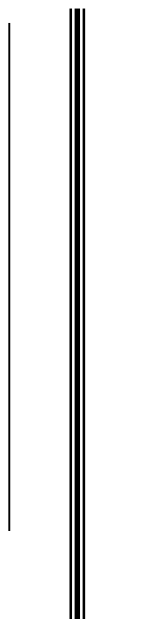


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



RENCANA KERJA

DITPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
NOMOR:KEP/ 8 /IX/2025, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
Nomor : Kep/ 8 /IX/2025

Tentang

RENCANA KERJA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025
(REVISI)

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Ditpolairud Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

2. Keputusan

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1008/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/285/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Strategi Polda Kalbar Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Barat Nomor: Kep/3/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025-2029 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2025 (REVISI)

1. Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing bagian dan Subdit di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 22 September 2025

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT



Tembusan :

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Karorena Polda Kalbar.

GUSMAN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Lingkungan Strategi	5
b. Analisa	16
2. Identifikasi Masalah	23
II. Tujuan dan Sasaran	24
1. Visi dan Misi Polda Kalbar	24
c. visi Polda Kalbar	24
d. misi Polda Kalbar	24
2. Visi dan Misi Ditpolairud Polda Kalbar	24
a. visi Ditpolairud Polda Kalbar	24
b. misi Ditpolairud Polda Kalbar	25
3. Tujuan Jangka Menengah	25
a. Tujuan Jangka Menengah Polda Kalbar	25
b. Tujuan Jangka Menengah Ditpolairud Polda Kalbar	26
4. Sasaran Prioritas	27
a. Sasaran Prioritas Polda Kalbar	27
b. Sasaran Prioritas Ditpolairud Polda Kalbar	27
III. Program Prioritas Nasional dan Arah Bijak Polri Tahun 2025	28
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar T.A. 2025	28
2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025	54
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025	55
1. Program dan Kegiatan	55
2. Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025	56
V. Penutup	58

LAMPIRAN

1. RENCANA KERJA TAHUNAN DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2025 (REVISI)
2. REKAP RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA T.A. 2025

RENCANA KERJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2025

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Ditpolairud Polda Kalbar adalah unsur pelaksana dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda, bertugas memelihara keamanan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Kalimantan Barat yang meliputi kegiatan penindakan hukum di wilayah perairan, patroli pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, patroli pengamanan alur pelayaran masyarakat Kalimantan Barat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang semakin pesat, demikian juga dinamika tantangan yang dihadapi Polri. Saat ini kita memasuki era Society 5.0 yang juga dikenal dengan 'super-smart society' dimana kehidupan manusia dipermudah dengan adanya teknologi dan teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Muncul banyak jenis kejahatan baru yang dahulu tidak dikenal, dan ini menuntut Polri untuk berinovasi dan siap menangani kejahatan tersebut.

Dinamika tantangan ini tidak terlepas dari pengaruh global, terutama dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebaran informasi yang sudah tidak mengenal batas negara, kemajuan sarana transportasi, persaingan bebas di sektor ekonomi, serta pergeseran tata nilai sosial budaya dan/atau pola komunikasi masyarakat. Adanya tuntutan dari masyarakat tentang hak demokrasi, perlindungan atas hak asasi manusia, terwujudnya rasa keadilan, serta kecepatan kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, maupun penegakan hukum yang berkeadilan, terus disuarakan dari waktu ke waktu. Di samping itu, pasca pandemi Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius, pemerintah perlu terus

waspada

waspada terhadap situasi ketidakpastian global mulai dari krisis energi hingga keuangan, serta ancaman kejahatan berbasis teknologi baru.

Salah satu dampak dari dinamika tantangan yang terkait dengan tugas pokok Polri adalah perkembangan modus operandi dari setiap bentuk gangguan kamtibmas, baik yang bersifat konvensional (penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya), transnasional (terorisme, narkoba, kejahatan dunia maya, penambangan/penebangan/penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, pencucian uang, gratifikasi, dan sebagainya), maupun kejahatan yang berpotensi memunculkan kontinjensi sosial (kekerasan sosial berlatar belakang SARA, tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok marginal, keributan antar kelompok masa, dan sebagainya). Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan bentuk kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih, seperti kejahatan siber, transaksi keuangan ilegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Bahkan para teroris dan kelompok ekstrim telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya.

Guna menghadapi tantangan dan perkembangan era digital yang semakin kompleks, perlu smart policing yang dimaknai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara lebih inovatif, menerapkan sains dan teknologi serta evidence-based (berbasis bukti), dan menggunakan pendekatan antar disiplin. Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan dengan terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri perlu terus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarana.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan

Berkelanjutan”. Dikarenakan tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2024. Sedangkan kebijakan prioritas nasional pemerintah tahun 2025 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri.

Ditpolairud Polda Kalbar sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) khususnya di wilayah perairan Provinsi Kalbar harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan keamanan di wilayah perairan Provinsi Kalbar demi terselenggaranya Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polda Kalbar tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Kalbar dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polda Kalbar dari pemerintah/swasta/ masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polda Kalbar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Ditpolairud Polda Kalbar diharapkan dapat membuat Ditpolairud Polda Kalbar semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Ditpolairud Polda Kalbar untuk senantiasa terus-

menerus

menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah:

- a. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
- b. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
- c. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
- d. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas. Mengacu pada Rencana Kerja Polda Kalbar T.A. 2024;

Mengacu pada Rencana Kerja Polri T.A. 2025, Ditpolairud Polda Kalbar telah menyusun Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Kerja Polda Kalbar T.A. 2025. Selain itu penyusunan Renja dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional SEBAGAI Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kalimantan Barat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam
penyusunan

penyusunan Rancangan Renja Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi perkembangan lingkungan strategis meliputi aspek kehidupan masyarakat di daerah perairan Kalimantan Barat yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam).

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Ditpolairud Polda Kalbar yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Lingkungan Strategi

Ditpolairud Polda Kalbar dipimpin oleh Direktur Polairud Polda Kalbar yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, Ditpolairud Polda Kalbar bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai / perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dan udara dalam lingkungan Polda Kalbar. Pelaksanaan tugas Ditpolairud Polda Kalbar meliputi:

- 1) Patroli;
- 2) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara di perairan;
- 3) SAR di wilayah perairan dan;
- 4) Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.

Fungsi Ditpolairud Polda Kalbar dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Ditpolairud Polda Kalbar menyelenggarakan:

- 1) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- 2) Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- 3) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
- 4) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
- 5) Pelaksanaan

- 5) Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

Dalam pelaksanaan tugas Dirpolairud Polda Kalbar dibantu oleh antara lain:

a. Unsur Pimpinan:

1. Wakil Direktur Polairud Polda Kalbar (Wadir Polairud Polda Kalbar) adalah pembantu utama Direktur Polairud yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Polairud.

b. Unsur Pembantu pimpinan dan pelaksana staf:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin). Melaksanakan penyusunan perencanaan organisasi, kesisteman, pelatihan peningkatan kemampuan, operasional dan latihan, manajemen sarana dan prasarana, administrasi personalia, kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, serta menyusun kebijakan dan rencana strategi dan pengembangan kekuatan fungsi serta jaringan dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun dan menyiapkan rencana anggaran, rencana kerja, administrasi materiil dan logistik, pemeliharaan dan perawatan personel serta pembinaan fungsi kepolisian perairan;
 - b) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap jalannya program kerja dan anggaran Ditpolairud Polda Kalbar beserta jajarannya;
 - c) menyelenggarakan fungsi pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan Satker;
 - d) menerbitkan semua surat perintah kegiatan penugasan personel kecuali surat perintah yang berhubungan dengan penugasan kapal, surat perintah yang berhubungan proses

penyelidikan

penyelidikan dan penyidikan dan surat perintah gerak kapal patroli serta surat perintah penjagaan;

- e) mengembangkan sistem dan metode dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan fungsi Polairud;
- f) menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan sistim dan metode fungsi Polairud;
- g) menyiapkan administrasi pelaksanaan wanjak dalam rangka mutasi Perwira, Bintara dan PNS di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar;
- h) menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin termasuk kesadaran hukum di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar;
- i) menyusun rencana, pelaksanaan, analisa dan evaluasi dan supervisi fungsi Polairud;
- j) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang perencanaan, anggaran, personel, sarpras dan sismet Polairud serta format laporan pelaksanaannya;
- k) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolairud Polda Kalbar;
- l) melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud Polda Kalbar.

Dalam pelaksanaan tugas Kasubbagrenmin di bantu oleh:

- a) Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren);
- b) Kepala Urusan Administrasi (Kaurmintu);
- c) Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data, program latkatpuan fumgsi Polairud, kegiatan operasi rutin maupun terpusat dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun dan mengajukan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) merencanakan

- b) merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program kegiatan latihan peningkatan kemampuan fungsi Polairud pada tahun anggaran berjalan sesuai Renja Satker yang menjadi tugas Subbagbinopsnal;
- c) merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan Latpraops yang diprogramkan Biro Ops Polda Kalbar dalam rangka operasi Kepolisian;
- d) merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan latihan yang melibatkan fungsi Polairud dalam rangka mendukung operasi kepolisian yang diprogramkan institusi non Polri;
- e) menyusun rancangan rencana latihan dan mengajukan anggaran pada tahun anggaran berjalan untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya guna dimasukkan dalam rancangan Renja Satker;
- f) menyusun rencana kegiatan latihan yang menjadi beban tugasnya secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- g) menyusun laporan latihan yang menjadi beban tugasnya secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- h) mendata, mendokumentasikan kegiatan latihan dan menata kearsipan/administrasi pelatihan;
- i) pengawasan pelatihan (di luar progam Subagopsnal) yang dilaksanakan Subsatker lainnya sebagai bahan laporan latihan Satker;
- j) menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan latihan dan kegiatan operasional Ditpolairud Polda Kalbar yang bersumber dari CIC;
- k) menerbitkan publikasi melalui buletin Ditpolairud Polda Kalbar atau media lainnya;
- l) menyelenggarakan pengumpulan laporan operasional dari subsatker yang terkait operasional pada tahun anggaran

berjalan

berjalan sesuai Renja Satker yang menjadi tugas Subbagopsnal;

- m) pengumpulan data hasil operasional subsatker terkait sebagai menyelenggarakan operasional untuk dilaporkan kepada Dirpolairud;
- n) menganalisa dan mengevaluasi hasil latihan yang diselenggarakan terbatas tugas dan tanggung jawab Subbagopsnal sesuai dengan renja Ditpolairud Polda Kalbar pada tahun anggaran berjalan;
- o) menghimpun dan mengkompulir hasil analisa dan evaluasi latihan yang diselenggarakan subsatker terkait dan operasional Ditpolairud Polda Kalbar dan Sat Polairud Polres untuk dijadikan laporan anev satuan pada tahun anggaran berjalan;
- p) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang pelatihan;
- q) melaksanakan administrasi latihan dan operasional serta menjaga tertib kearsipan dalam lingkup terbatas pada subbagopsnal;
- r) melaksanakan pembinaan personel dan perawatan sarana prasarana yang berada dalam lingkup terbatas pada Subbagbinopsnal;
- s) membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Ditpolairud Polda Kalbar.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Subbagian Administrasi Operasional (Kasubbagminopsnal);
- b) Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi (Kasubbaganev).

c. Unsur pelaksana tugas pokok

- 1. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Kalbar.

Melaksanakan

Melaksanakan penyusunan rencana penyidikan, pembinaan taktis dan teknis penegakan hukum dalam lingkup Kepolisian Perairan serta antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan diwilayah perairan Polda Kalbar dan melaksanakan tugas khusus lainnya sesuai perintah pimpinan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka penyelidikan penindakan, pemeliharaan, perawatan tahanan dan barang bukti;
- b) menyelenggarakan penyelidikan, penindakan tindak pidana di wilayah perairan Kalbar dan pemeliharaan, perawatan tahanan serta barang bukti;
- c) menyelenggarakan pembinaan taktis dan teknis penegakan hukum dalam lingkup kepolisian perairan tingkat Polda maupun kewilayahan;
- d) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi tindak pidana di perairan Polda Kalbar;
- e) merencanakan, merumuskan, dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas penegakan hukum dalam rangka mendukung kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian di wilayah Perairan Polda Kalbar;
- f) mengumpulkan, menyiapkan, mendistribusikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di perairan;
- g) membuat pilun-pilun dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan administrasi penyelidikan dan penyidikan di lingkup Subditgakkum, Kapal Polisi serta Polairud kewilayahan;
- h) menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan jaringan guna mendapatkan informasi serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana di wilayah perairan Kalbar;
- i) menganalisa

- i) menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum sebagai bahan masukan bagi perencanaan kegiatan operasional fungsi Polairud termasuk terhadap kasus-kasus tertentu yang menonjol serta memberikan rekomendasi penanganannya;
- j) memberikan bantuan teknis dan backup penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data gunaantisipasi dampak penanganan perkara yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalbar maupun kesatuan kepolisian perairan kewilayahan;
- k) memberikan bantuan teknis dan back up penindakan dalam rangka pengungkapan dan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalbar maupun kesatuan kepolisian perairan kewilayahan;
- l) menyelenggarakan gelar perkara;
- m) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang penegakan hukum;
- n) melaksanakan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dan badan/instansi/lembaga di luar Polri (PPNS) yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum;
- o) membuat dan mengirimkan ringiat serta laporan bulanan dan tahunan kepada Dirpolairud tembusan Kabagbinopsnal;
- p) mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas team was idik;
- q) melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud Polda Kalbar.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Seksi Intelair (Kasiintelair);
- b) Kepala Seksi Penyidikan (Kasisidik);
- c) Kepala Seksi Tahti (Kasitahti).

2. Sub Direktorat Patroli Air Dan Udara (Subditpatroliairud) Dit Polairud Polda Kalbar.

Melaksanakan penyusunan rencana Patroli, Polmas perairan kegiatan SAR di wilayah perairan Polda Kalbar serta melaksanakan tugas khusus lainnya sesuai perintah pimpinan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai pembinaan masyarakat perairan, patroli kawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan;
- b) menyelenggarakan pembinaan masyarakat perairan yang dilaksanakan kapal polisi;
- c) menyelenggarakan patroli dan pengawalan perairan yang dilaksanakan kapal polisi;
- d) menyusun rencana kegiatan pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan perairan oleh kapal polisi secara periodik (bulanan dan tahunan);
- e) setiap saat melaksanakan pengendalian kapal polisi dalam rangka pencapaian target dengan memberikan cara bertindak, petunjuk penanganan dan tindak lanjut pelanggaran/kejahatan yang ditemukan di laut;
- f) mengajukan saran mengenai sismet tentang pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan;
- g) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan masyarakat perairan, patroli dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi;
- h) menyusun arahan kepada pengemban fungsi teknik Polairud mengenai pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan ;
- i) menyusun

- i) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang patroli, pengawalan dan binmas perairan;
- j) memelihara dan meningkatkan kemampuan/keterampilan staf Subditpatroliairud dan personel kapal melalui koordinasi pelatihan dengan Subsatker lainnya;
- k) mengarahkan kepada para Komandan kapal untuk kegiatan :
 - 1) pembinaan jasmani dan rohani personel kapal;
 - 2) pelaksanaan serta pertanggung jawaban keuangan;
 - 3) pemeliharaan kapal;
 - 4) administrasi kapal;
 - 5) petunjuk lapangan (sismet);
 - 6) komunikasi kapal;
 - 7) pengelolaan sumber daya kapal;
 - 8) binmas, patroli dan pengawalan;
 - 9) pelaporan;
 - 10) TPTKP.
- l) merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Kapolda u.p. Dirpolairud Polda Kalbar di bidang patroli perairan;
- m) mengharmoniskan pelaksanaan patroli antara Ditpolairud Polda Kalbar dan Satpolairud Polres;
- n) menerbitkan surat perintah gerak kapal patroli polisi berdasarkan surat perintah berlayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Polairud Polda Kalbar;
- o) mengajukan kebutuhan dan mendistribusikan uang saku, uang sandar, uang air tawar dan tunjangan lainnya berdasarkan penugasan kapal (SPB/TR);
- p) mengkompulir dan meneruskan laporan kerusakan serta rencana kebutuhan kapal;
- q) mengkoordinasikan dan mengawasi pemberangkatan maupun penerimaan kapal tiba di pangkalan serta membuat laporannya;
- r) menyelenggarakan

- r) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan masyarakat perairan serta patroli dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi;
- s) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap personel dan kapal polisi baik yang sedang bertugas maupun yang berada di pangkalan;
- t) merencanakan, menyusun dan mengusulkan penempatan/ mutasi Komandan Kapal, KKM dan Perwira Kapal serta ABK;
- u) menyiapkan dan melaksanakan pemberian back up kepada satuan fungsi Polairud kewilayahan khususnya dukungan alat dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) bencana perairan;
- v) melaksanakan dukungan transportasi perairan dalam rangka tugas kepolisian ;
- w) pemberian acara pimpinan pasukan (APP) bagi ABK pada saat pemberangkatan maupun kembali dari tugas;
- x) mengajukan usulan pengembangan kemampuan bagi staf dan ABK;
- y) menyusun laporan kegiatan secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- z) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dir Polairud Polda Kalbar;

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Seksi Patroli dan Pengawalan Perairan dan udara (Kasi Patwalairud);
 - b) Kepala kasi Binmasair dan Potdirga (Kasibinmasair).
3. Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdit Fasharkan) Ditpolairud Polda Kalbar.

bidang sarana dan prasarana alat apung/ Kapal Pattroli maupun speed Patroli, alat-alat komunikasi di atas kapal/ speed, serta

sebagai

sebagai team pengecek kelaik lautan Kapal Patroli Polisi dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal;
- b) menyelenggarakan pengawasan, pemeliharaan dan perawatan permesinan, kelistrikan, docking dan bangunan kapal serta pengkajian teknologi perkapalan dalam rangka kelaiklautan dan keselamatan pelayaran;
- c) merumuskan, mengkoordinasikan dan menyiapkan kebijaksanaan Kapolda Kalbar u.p. Dirpolairud di bidang fasilitas pemeliharaan dan peralatan khusus Polairud;
- d) menyiapkan dan menyusun spesifikasi teknis dalam rangka pembaharuan dan penambahan peralatan pendukung alat utama Polairud serta kelistrikan kapal;
- e) menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka pembaharuan dan penambahan alat pendukung alat Polairud kepada Dirpolairud Polda Kalbar tembusan Kasubbagrenmin;
- f) mengikuti perkembangan teknologi dan pengkajian dalam rangka pra pengadaan peralatan utama beserta pendukung;
- g) menyelenggarakan pengumpulan data dari para komandan kapal dalam rangka pemeliharaan dan perawatan kapal polisi;
- h) membantu/memberi pertimbangan pengembangan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alat Ditpolairud Polda Kalbar;
- i) mengkoordinasikan rencana pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dengan badan/instansi didalam dan di luar Ditpolairud Polda Kalbar;
- j) memberikan rekomendasi berkaitan dengan kelaiklautan kapal Polisi beserta alat pendukungnya;
- k) mengusulkan pelaksanaan uji berlayar (sea trial) terhadap kapal yang selesai perbaikan, yang akan berangkat tugas
- l) dan

- l) dan yang kembali dari penugasan dengan dilampiri kerangka acuan uji berlayar sea trial dan membuat laporannya;
- m) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang fasharkan, kelaiklautan dan keselamatan;
- n) membuat dan mengirimkan rengiat bulanan dan tahunan;
- o) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolairud Polda Kalbar;
- p) melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud Polda Kalbar.
- q) didalam melaksanakan tugas Subditfasharkan menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan di Dok serta bangunan kapal, perbaikan mesin serta instalasi listrik dan pengawasan kelaiklautan serta keselamatan kapal Polri.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Seksi Fasilitas (Kasifas);
- b) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasiharkan);
- c) Kapal.

b. Analisa

Pelaksanaan tugas Dipolairud Polda Kalbar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Dipolairud Polda Kalbar.

1) Kekuatan (*Strenght*)

- a. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di tahun 2025 Ditpolairud Polda Kalbar didukung dengan Piranti Lunak/dasar hukum berupa

Undang

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kapolri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Perairan;
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Perairan;
 - 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - 10) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - 11) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara saat ini memiliki 206 orang personel dari DSP 290 orang personel dan terbagi atas beberapa bag dan subdit dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Direktur

- 1) Direktur Polairud : KOMBESPOL RASPANI, S.I.K.
- 2) Wadir Polairud: AKBP AHMAD FADLIN, S.I.K., M.Si.
- 3) Kabag Binopsnal : -
Anggota Bagbinopsnal
 - Perwira : 1 pers
 - Brigadir : 15 pers
 - Tamtama : 4 pers
 - PNS : 1 pers
- 4) Kasubdit Gakkum : AKBP HARRIS BATARA SIMBOLON, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla.
Anggota Subdit Gakkum
 - Perwira : 4 pers
 - Brigadir : 22 pers
 - Tamtama : -
 - PNS : 1 pers
- 5) Kasubdit Patroliairud : AKBP YOHANES ANDIS ARYA PANCA PUTRA, S.H., M.H.
Anggota Subdit Subdit Patroliairud
 - Perwira : 4 pers
 - Brigadir : 79 pers
 - Tamtama : 18 pers
 - PNS : -
- 6) Kasubdit Fasharkan : AKBP SUWANDI, S.Ag.
Anggota Subdit Subdit Fasharkan
 - Perwira : 1 pers
 - Brigadir : 8 pers
 - Tamtama : 1 pers
 - PNS : 1 pers

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas Ditpolairud Polda Kalbar adalah:

- 1) Kendaraan Bermotor umum

(a) Sepeda Motor : B : 3 Unit

(b) Mobil

- (b) Mobil Patroli SUV : B : 1 Unit
- (c) Sedan : B : 1 Unit
- (d) Truck Sedang : B : 2 Unit
- (e) Bus Sedang : B : 2 Unit
- 2) Kendaraan Air
 - (a) Kapal Patroli Polisi : RR 1 Unit, B 7 Unit,
 - (b) Kapal Patroli Pantai : RR 3 Unit, B 4 Unit,
 - (c) Speed Boat/Motor Tempel : RR 10 Unit, B 7 Unit,
 - (d) Out Boat Motor : RR 1 Unit
 - (e) Perahu Karet : B 7 Unit
 - (f) Perahu Motor Tempel : B 1 Unit
 - (g) Hover Craft : B 3 Unit
 - (h) Kapal Pemburu Cepat : B 1 Unit
 - (i) Long Boat : B 2 Unit
- 3) Alkom
 - (a) (b) Handy Talky (HT) : 90 Unit
 - (c) Faximile : 1 Unit
 - (d) Unit Tranceiver Ssb Portable : 12 Unit
 - (e) Unit Tranceiver Ssb Stationery : 2 Unit
 - (f) Unit Tranceiver HF Stationery : 2 Unit
 - (g) Unit Tranceiver VHF Stationary : 2 Unit
 - (h) Unit Tranceiver UHF Stationary : 4 Unit
 - (i) Peralatan Antena VHF/FM Lainnya : 1 Unit
 - (j) Antena UHF Stationary : 1 Unit
 - (k) Alat RX Radio UHF : 1 Unit
 - (l) Charger : 15 Unit
- 4) Senjata Senpi
 - (a) Genggam : 127 Pucuk
 - (b) Senpi Bahu : 268 Pucuk
 - (c) SMR : 5 Pucuk

5) Alsus

5) Alsus Kepolisian

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (a) Borgol | : RR : 30 Buah |
| (b) Tongkat Push Button | : B : 1 Buah |
| (c) Rompi Anti Peluru | : RR : 143 Buah |
| (d) Tabung Pemadam Api | : RR : 200 Buah |
| (e) Senter Bawah Air | : B : 8 Buah |
| (f) Alat Pemotong Stinger | : RR : 7 Buah |
| (g) Genset | : B : 2 Buah |

- c. Tersedianya 1 Kapal Patroli dari Korpolaairud Baharkam Polri
- d. Kepercayaan masyarakat terhadap Ditpolairud Polda Kalbar yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri khususnya Ditpolairud Polda Kalbar dilapangan;
- e. Reputasi / kepercayaan Ditpolairud Polda Kalbar oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan kasus yang menjadi atensi pemerintah dalam hal penanganan *Trafficking in person, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Trading, Illegal Fishing*, korupsi, narkoba, kasus penyeludupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang dan barang;
- f. Adanya koordinasi dan kerjasama Ditpolairud Polda Kalbar dengan instansi samping dan masyarakat dalam menghadapi tantangan tugas Ditpolairud di wilayah perairan Kalimantan Barat;

2) Kelemahan (*weakness*)

- a. Jumlah personel Ditpolairud Polda Kalbar masih belum sesuai dengan DSP 290 Personel saat ini jumlah personel rill 206 personel;
- b. Personel Kapal dan Speed belum masuk dalam Struktur Organisasi karena belum ada Skep pengukuhan dari Kapolri;
- c. Belum memiliki Kapal Patroli Standar Khususnya Type B3 guna menunjang Patroli di Wilayah Perbatasan Negara;
- d. Belum memiliki Ranmor Ambulance dan Ran Air khusus SAR;
- e. Belum

- e. Belum adanya Gudang Penyimpan Barang Bukti hasil tangkapan Ditpolairud Polda Kalbar sehingga mengalami permasalahan dalam penyimpanan barang bukti terhadap Kasus yang ditangani;
- f. Belum adanya dukungan anggaran Reklamasi sebelah kanan Mako Ditpolairud, Saluran Air di lingkungan asrama dan gedung Bin Opsnal dan Provost mengingat posisi gedung yang berada di tepi sungai yang mengalami abrasi mengingat factor usia bangunan yang sudah tua;
- g. Belum adanya Garasi Ran Air RIB, Mengingat adanya tambahan Sarana dan Prasarana yang di diterima oleh Satker Ditpolairud Polda Kalbar;
- h. Belum adanya Dok Kapal khususnya untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan angkutan air yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar;

3) Peluang (*opportunities*)

- a. Arah bijak Pemerintah Daerah untuk wilayah perbatasan dan wilayah pedalaman sedang berjalan;
- b. Kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan *good government*, *clean governance*, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima;
- c. Peningkatan anggaran operasional Kepolisian dan tunjangan kinerja;
- d. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kalbar kepada Polda Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kalbar;
- e. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Ditpolairud Polda Kalbar dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas Wilayah Perairan melalui layanan pesan singkat;
- f. Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

g. Adanya

- g. Adanya atensi pemerintah pusat tentang prioritas perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan;
- h. pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Ditpolairud Polda Kalbar yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Ditpolairud Polda Kalbar untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.

4) Ancaman (*Threat*)

- a) Kejahatan lintas batas antar negara dan antar pulau yang terjadi diwilayah hukum Ditpolairud Polda Kalbar terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) meliputi :
 - (1) pelanggaran lintas batas orang dan barang.
 - (2) *trafficking in person*.
 - (3) penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.
 - (4) penyelundupan kendaraan.
 - (5) *illegal logging, illegal mining, illegal trading dan illegal fishing*;
 - (6) pengaruh budaya / adat istiadat.
- b) Wilayah Kalimantan Barat yang memiliki pantai sepanjang 1.163 Km yang merupakan corong barat pertahanan Indonesia bagian Barat serta laut yang demikian luas juga menimbulkan kerawanan tersendiri, karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan rawan akses peredaran gelap Narkoba;
- c) Sulitnya masyarakat perbatasan (Kalbar - Malaysia) untuk mengakses informasi baik media cetak maupun elektronik dari dalam negeri dan mudahnya masyarakat perbatasan mengakses informasi dari luar (Malaysia) akan berdampak negatif terhadap wawasan

kebangsaan

- kebangsaan dan lunturnya nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa;
- d) Masih banyaknya pulau - pulau kecil yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga;

2. Identifikasi Masalah

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polda Kalbar pada tahun 2025 diprediksi akan semakin berat, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan Rill personel Ditpolairud Polda Kalbar saat ini hanya 206 belum sesuai dengan DSP yaitu 290 Personel;
- b. Wilayah Kalbar mempunyai panjang pantai 1.163 KM dan memiliki 218 pulau kecil terdiri dari 161 pulau berpenghuni dan 57 pulau kecil tidak berpenghuni, namun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar belum dapat menjangkau lokasi tersebut dalam jangka waktu singkat dikarenakan Kapal Patroli Ditpolairud Polda Kalbar Masih Non Standar;
- c. panjangnya jalur perbatasan dan adanya pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan dan rawan terjadi aneksasi pulau/wilayah Kalbar oleh pihak asing masih perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Ditpolairud Polda Kalbar;
- d. pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi, transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh Ditpolairud Polda Kalbar mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara profesional,

khususnya

khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadi antensi pemerintah;

- e. Keterbatasan daya dukungan anggaran yang diberikan kepada Ditpolairud Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional terutama pelaksanaan tugas patroli wilayah perbatasan minimnya dukungan anggaran Bmp dan dukungan anggaran patroli yang masih jauh di bawah Norma Indeks;
- f. Belum maksimalnya pelayanan Ditpolairud kepada masyarakat karena keterbatasan personel, anggaran dan Sarpras;
- g. Belum adanya Gudang Penyimpan Barang Bukti;
- h. Belum adanya dukungan anggaran Reklamasi, Saluran Air dan Bangunan Mako mengingat posisi mako yang berada di tepi sungai yang mengalami abrasi mengingat factor usia bangunan yang sudah tua;
- i. Belum adanya Mobil Roda 4 double gardan guna mendukung percepatan pergerakan pasukan dalam pelaksanaan kegiatan SAR
- j. Belum adanya Dok Kapal khususnya untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan angkutan air yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar;
- k. Belum Terpenuhi Kapal Patroli Standar Khususnya Type B3 guna menunjang Patroli di Wilayah Perbatasan Negara;

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi Polda Kalbar

- a. Visi Polda Kalbar

Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib.

- b. Misi Polda Kalbar

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

2. Visi dan Misi Ditpolairud Polda Kalbar

- a. Visi Ditpolairud Polda Kalbar

Visi

Visi Ditpolairud Polda Kalbar mengacu pada visi Polda Kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2025, yaitu:

" Terwujudnya Ditpolairud Polda Kalbar yang unggul dalam rangka Pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Perairan guna Mewujudkan Kalbar Maju".

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

1. Terlaksananya Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) di wilayah Perairan Polda Kalimantan Barat;
2. Meningkatnya Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Polda Kalimantan Barat.

b. Misi Ditpolairud Polda Kalbar

Misi Ditpolairud Polda Kalbar sampai dengan tahun 2025, yaitu:

"Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Wilayah Perairan".

Makna : Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif dan rasa aman kepada seluruh masyarakat pesisir Kalimantan Barat, menjaga Kamtibcar pelayaran untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang, serta menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di perairan Polda Kalbar.

3. Tujuan Jangka Menengah

a. Polda Kalbar

Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah "Polda Kalbar Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan tujuan.

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat menegakkan hukum secara berkeadilan;

2) menegakkan

- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

b. Ditpolairud Polda Kalbar

Ditpolairud Polda Kalbar turut serta mendukung Polda Kalbar dalam “Polda Kalbar Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dari 5 poin tujuan jangka menengah Polda Kalbar tersebut diatas Ditpolairud Polda Kalbar melaksanakan poin:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat menegakkan hukum secara berkeadilan dengan penjabaran Ditpolairud melaksanakan kegiatan Patroli di wilayah perairan Kalimantan barat guna menciptakan situasi kamtibmas serta terdukungnya setiap kegiatan dan Operasi Kepolisian di wilayah perairan.
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara dengan penjabaran Ditpolairud Polda Kalbar melaksanakan penegakan hukum dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan wilayah perairan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat perairan, nelayan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

4. Sasaran Prioritas

a. Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2025 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri yaitu sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kalimantan Barat secara Prediktif dan Proaktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Kalbar yang Semakin Inovatif Berbasis Digita”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI)”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional”;
- 5) **kelima** “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential Police Equipment (MEPE)”
- 6) **keenam** “Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”

b. Ditpolairud Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2025 mengacu kepada Sasaran Prioritas Polda Kalbar yaitu sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kalimantan Barat secara Prediktif dan Proaktif”;
2. **ketiga** “Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI)”;

III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2025

1. Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2025

a. Sasaran Prioritas I “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kalimantan Barat secara Prediktif dan Proaktif”, terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 2) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
- 3) mengoptimalkan kegiatan “Pemolisian Masyarakat (Community Policing)” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 4) Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- 6) meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “Slum Area”;
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta event nasional/internasional tahun 2025;
- 8) melaksanakan “back up” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan;
- 9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;

10) melaksanakan

- 10) melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
- 11) mendukung kegiatan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
- 12) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- b) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;
(giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- c) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pembinaan dan operasional

operasional kepolisian serta pengukuran Indeks Kamtibmas Polri; (giat5067,progDukma/SP1/SS5/IKPe);

- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat; (giat3114,3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media online maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama Igaras (Ideologi garis keras) yang telah mengikuti program moderasi beragama, dalam penanganan kasus terorisme; (giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan "stakeholder" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks napi terorisme beserta keluarganya; (5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (giat3149,progDukma/SP1/SS5/IKPc);
- f) melaksanakan

- f) melaksanakan “edukasi” dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan press release tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (giat3070,3149,progDukma/SP1/SS5/IKPg);
 - g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata; (giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan “Pemolisian Masyarakat (Community Policing)” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP; (giat3133,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan

- d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarpras yang modern; (giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan

- c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam- jam rawan dalam rangka mendukung “Pertumbuhan Ekonomi” serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “Slum Area”;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi; (giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; (giat3130,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “Bhabinkamtibmas” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan “pelayanan Kesehatan” dan “trauma healling” pada daerah rawan gempa dan bencana; (giat3072,progDukma/SP1/SS3/IKPa/SS5/IKPe);

7) arah

- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta event nasional/internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat berlangsung event nasional/internasional berlangsung;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan pengamanan event nasional Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh;
(giat5079,3130,3133,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) membantu pelaksanaan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur;
(giat3130,3133,5079,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 8) arah bijak: melaksanakan “back up” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan;
untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up pengamanan

Ibu

- Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;
(giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
(giat5076,5087,5080,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) melaksanakan back up pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(giat3130,3131,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- d) melaksanakan back up kegiatan pengamanan di Kawasan Obvitnas dan objek tertentu;
(giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- e) melaksanakan kegiatan back up pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba; (giat5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan “stakeholder” terkait;
(giat3120,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Kalbar guna mendukung kegiatan keamanan laut;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: meningkatkan kegiatan patrol kapal Polri dan “back up” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai Prov. Kalbar untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 11) arah

- 11) arah bijak: mendukung kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/ internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(giat3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi event;
(giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) melaksanakan pengamanan event nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala intensitas tinggi;
giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/internasional tahun 2025; (giat5079,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat,3130,5087,3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan

serta

serta Obvit/Obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni;

(giat3130,3131,5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Kalbar yang semakin Inovatif Berbasis Digital”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar yang berbasis TI (Teknologi Informasi);
- 2) meningkatkan profesionalisme Polda Kalbar dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar/gratifikasi pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar;
- 3) mengoptimalkan “ketanggapsegeraan” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar yang berbasis TI;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
- b) mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP2/ SS1/IKU1);

c) melakukan

- c) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi afirmatif (menguatkan) di kawasan perbatasan Kalbar; (giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4b);
 - d) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/laman website kalbar.polri.go.id secara berkala; (giat3149,progDukma/SP2/SS1/IKPg);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme Polda Kalbar dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar;
- untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan Intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK online; (giat3128,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes Polda Kalbar; (giat3072,progDukma/SP2/SS5/IKP5e);
 - c) mengoptimalkan proses integrasi Binmas Online System (BOS) V2 dengan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; (giat5076,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelayanan publik;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat5081,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan pembinaan teknis (supervisi, asistensi dan verifikasi) dan audit terhadap sistem manajemen pengamanan objek vital nasional serta objek vital tertentu; (giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
- c. Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI)” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 3) mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum;
 - 4) mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 10 (sepuluh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Kalbar; (giat3134,4342,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);

- b) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

(giat

- (giat3140,3142,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, asuransi, investasi, perbankan dan sektor keuangan; (giat3142,3145,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- d) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Kalbar; (giat4342,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
- e) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas; (giat3133,progHarkamtibmas;giat4343,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
- f) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui “Restorative Justice” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan; (giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- g) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (cyber crime) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber; (giat3151,progLidikSidik;giat5076,pogHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);
- h) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas; (giat3130,progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);
- i) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik; giat3142,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- j) memberikan

- j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.
(giat3140,3141,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- 2) arah bijak: mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memberikan SP2HP2 kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
(giat3137,5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
 - b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
 - c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalbar yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - 3) meningkatkan

- 3) meningkatkan kualitas SDM Polda Kalbar yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
- 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan serta pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
- 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalbar melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalbar yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/ instruktur dan pengasuh;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
 - b) meningkatkan pelaksanaan latihan dan Harkatpuan fungsi “Dalmas dan Negosiator” yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat dan event nasional/internasional tahun 2025;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
 - c) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “Menjunjung Tinggi HAM” dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat dan menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
(giat3100,progProfesionalismeSDMpolri;giat5076,3130,5087,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb);
 - d) meningkatkan kapasitas SDM Polda Kalbar di bidang Siber dan forensik dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

(giat

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat3141,3151,progLidikSidik/SP4/SS3/IKPb);

- e) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polairud serta Dirlantas Polda Kalbar dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);

- f) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan PNS Polri;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat4341,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKPb);

- g) meningkatkan kapasitas personel kedokteran kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personel Polda Kalbar dan keluarganya;

(giat3072,progDukma;giat3100progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);

- 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polda Kalbar yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polda Kalbar antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE;

(giat5052,progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- b) meningkatkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital;

(giat5053,progDukma SP4/SS5/IKPe);

- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polda Kalbar yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan

- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis TI (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward);
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polda Kalbar sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polda Kalbar yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polda Kalbar yang berkualitas berdasarkan kebijakan zero growth, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2025 sebanyak 5.623 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;
(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kalbar untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 terdiri dari: Lemhanas 1 orang, Sespimti 3 orang, Sespimmen 6 orang, S-1 STIK-PTIK 5 orang, Sespimma 5 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 72 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 37 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 6 orang, UDKP/I PNS 6 orang, PKN I 1

orang

orang, PKN II 2 orang, PKA 3 orang, PKP 3 orang, SPPK 2 Orang, Dikbangspers 1 giat;

(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;

(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholder, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) di tingkat Polda;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan penyempurnaan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “sistem reward and punishment” serta sistem reward terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi

perencanaan

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP guna menerapkan Merit System dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

(giat3100,3108,progProfesionalismeSDMPolri;giat5076,progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKPa);

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada a Polri dan keluarganya serta pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;

(giat3072,progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai Polri yang gugur/tewas saat tugas dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan user friendly;

(giat3072,progDukma;giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS5/IKPe);

- c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan user friendly termasuk berkaitan dengan Asabri;

(giat

(giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);

- d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);

(giat3072,5062,progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- e. Sasaran Prioritas V “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential Police Equipment (MEPE)” terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;
- 2) pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah termasuk diwilayah perbatasan, terjauh dan terluar di Kalbar;
- 3) melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara online;
(giat3071,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);

- b) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB prototype dan gedung Satpas prototype;

(giat

- (giat3071,progDukma;giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- c) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Indonesia Safety Driving Center;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- d) melanjutkan pembangunan dan pengembangan RTMC/TMC;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- e) melanjutkan pembangunan/pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan dan modern di jalan raya;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat3084/SP5/SS4/IKPb);
- f) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun Polres untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri;
(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- g) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (MEPE);
(giat5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- h) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan Perbatasan dan Destinasi Wisata;
(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 2) arah bijak: pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh Kalbar;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan

pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;

(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- 3) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem teknologi informatika kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap; (giat3071,ProgDukma;giat3084,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
- 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan internal Polri;
- 4) meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polda Kalbar yang transparan dan akuntabel;
- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

6) meningkatkan

- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik complain secara efektif dan terpercaya berbasis online; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - b) mendorong pelayanan publik secara online yang bersih transparan dan akuntabel berbasis Medsos/Whatsapp;
(giat3091,3149,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) mengoptimalkan

- c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal;
(giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespimma, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan “operasi bersih” terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi Whistle Blower System (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan

- b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- 4) arah bijak: meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polda Kalbar;
(giat3068,3091,4339,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- b) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- c) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap;
(giat4339,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru; (giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih predikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polresta, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik

publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
(giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPd);

- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025

- a. Sasaran Prioritas I “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kalimantan Barat secara Prediktif dan Proaktif”, arah bijak sebagai berikut:

melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Kalbar guna mendukung kegiatan keamanan laut;

untuk mewujudkan arah bijak, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan “back up” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai Prov. Kalbar untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa).

b. Sasaran

- b. Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI)” arah bijak sebagai berikut:
- mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:
- arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak, strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Kalbar;
(giat3134,4342,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - b) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Kalbar;
(giat4342,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb).

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025

1. Program dan Kegiatan

- a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Ditpolairud Polda Kalbar
 - 1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Ditpolairud Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional di wilayah perairan Kalimantan Barat.
 - 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
 - b) pengembangan perbekalan umum.

b. Program

b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif di wilayah perairan Kalimantan Barat.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) penyelenggaraan kepolisian perairan;

c. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kalimantan Barat melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) penyelenggaraan laboratorium forensik;
- b) penindakan tindak pidana perairan;

2. Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar Tahun Anggaran 2025

- a. Alokasi Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 sebesar Rp. 29.071.504.000.- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*). Adapun rincian pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 sebagai berikut:

1) Rincian Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 per Jenis Belanja sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai : Rp. 14.191.823.000,-
- b) Belanja Barang : Rp. 14.879.681.000,-
- c) Belanja Modal : Rp. 0,-

2) Rincian

- 2) Rincian Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni : Rp. 29.071.504.000,-
 - b) PNBP : Rp. 0,-
 - c) BLU : Rp. 0,-
- 3) Rincian Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 per Program sebagai berikut:
 - a) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Rp. 2.049.847.000,-;
 - b) Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri
Rp. 10.697.335.000,-;
 - c) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp. 16.324.322.000,-.
- b. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025
 1. Mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan Intake Ditpolairud Polda Kalbar tahun 2025, namun Pagu Indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
 2. Mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
 3. Mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat, serta untuk mendukung tercapainya prioritas Ditpolairud Polda Kalbar tahun 2025;
 4. Meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair jajaran Polda Kalbar;

5. meningkatkan

5. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah perbatasan NKRI;
6. Mengakomodir dan mendukung kegiatan Program Prioritas Kapolda Kalbar yang terdiri dari:
 - a) perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0;
 - b) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
 - c) peningkatan kinerja penegakan hukum.

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat T.A. 2025 disusun sebagai bahan masukan/pedoman Subsatker dalam menjalankan kegiatan operasional dan pembinaan untuk melayani masyarakat di bidang Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum T.A. 2025.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 22 September 2025


AGUSMAN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2025	
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Responsif Prediktif	Tingkat Kemananan di Wilyah Perairan Kalimantan barat	18,3 (3,3)	IKU bersifat outcome
2.	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan	Clearance Rate Tindak Pidana di wilayah Perairan Kalimantan Barat	100 % (5,0)	IKU bersifat outcome

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 22 September 2025


AGUSMAN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLSI NRP 75081004

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. **VISI** : Terwujudnya Ditpolairud Polda Kalbar yang unggul dalam rangka Pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Perairan guna Mewujudkan Kalbar Maju
3. **MISI** : Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Wilayah Perairan
4. **PRIORITAS NASIONAL**
5. **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		16.324.322,-
01.01	Indeks Harkamtibmas	0,01	
02	Penegakkan hukum secara berkeadilan		2.049.847,-
02.01	Indeks Gakkum	97 %	
03	Modernisasi Teknologi		10.697.335,-
04.01	Persentase Pemenuhan Almatsus	-	

6. PROGRAM PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.049.847	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.049.847
060.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	10.697.335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.697.335
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.324.322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.324.322
Total		29.071.504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.071.504



22 September 2025
 DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR
 KOMSAR S. SEBAR POISI NRP 75081004

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan		2.049.847,0
01.01	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum di Perairan	97 %	
Total			2.049.847,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri	2.049.847,0
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
Total		2.049.847,0

LAMP. KEP. DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR

NOMOR : KEP/ 8 / IX / 2025

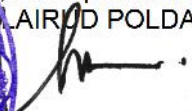
TANGGAL: 22 SEPTEMBER 2025

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	2.045.847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.045.847,0
Total		2.049.847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.049.847,0



Pontianak, 22 September 2025
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR


KOMISAR BESAR POISI NRP 75081004

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 – Modernisasi Teknologi
3. PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Modernisasi Teknologi		10.697.335,0
01.01	Persentase Sarpras Ditpolairud	-	
Total			10.697.335,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Almatsus dan Saprass	10.697.335,0
01.01	Persentase Sarpras Ditpolairud	
Total		10.697.335,0

LAMP. KEP. DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR

NOMOR : KEP/ 8 / IX / 2025

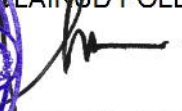
TANGGAL: 22 SEPTEMBER 2025

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	3.951.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.951.277,0
5061	Pengembangan Perbekalan umum	6.746.058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.746.058,0
Total		10.697.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.697.335,0



Pontianak, 22 September 2025
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR


KOMISARIS BESAR POISI NRP 75081004

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 – Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		16.324.322,0
01.01	Jumlah Patroli Perairan Kalbar	0,01	
Total			16.324.322,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	16.324.322,0
01.01	Indeks Harkamtibmas	
Total		16.324.322,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.165.722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.541.575,0
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	158.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158.600,0
Total		16.324.322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.324.322,0

Pontianak, 22 September 2025
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

KOMISAR BESAR POLISI NRP 75081004

